

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan  
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)  
Volume 7 Nomor 4 Juni 2021. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i4.9>  
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT GOLPUT  
MASYARAKAT PADA PEMILUKADA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 DI  
KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO**

**Harpinsyah<sup>1</sup>, Halim Perdana Kusuma<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo  
Jl. Diponegoro 27 Muara Bungo, Jambi  
Email: harpinsyah7@gmail.com

#### **ABSTRACT**

*This research was conducted at Pasar Muara Bungo District. The location was chosen on purpose or "purposive". The location was chosen because it was included in 3 (three) Districts that had a high level of golput (white group) compared to other Districts in Bungo Regency, namely 4.817 voters or 10,5%. This study aims to analyze the factors that influence the high level of abstention from the community in the 2011 Pemilukada Bungo Regency in Pasar Muara Bungo District. The method in this research is quantitative with data taken from the Permanent Voters List (DPT) of the Bungo Regency Pemilukada in 2011. The results show that among the factors that cause low levels of community participation in post-conflict local elections are socio-economic factors, passive community participation and psychological and rational factors.*

**Keywords:** *Analysis, Causal factors, Abstention, Post-conflict local election, Community.*

#### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Lokasi dipilih dengan sengaja atau "purposive. lokasi dipilih karena termasuk kedalam 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki tingkat golput (golongan putih) yang tinggi di banding Kecamatan lainnya dalam Kabupaten Bungo, yaitu 4.817 pemilih atau 10,5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat golput masyarakat pada Pemilukada Kabupaten Bungo tahun 2011 di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Bungo tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor yang menyebabkan rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada adalah faktor social ekonomi, masyarakat pasif dalam berpartisipasi dan factor psikologis serta rasional.*

**Kata Kunci:** *analisis, faktor penyebab, golput, pemilukada, masyarakat*

#### **PENDAHULUAN**

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Kelompok ini lebih dihubungkan dengan ketidak ikutsertaan dalam Pemilihan, misalnya pemilihan umum, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan yang sejenis dengan itu. Ketidak ikutsertaan dapat disebabkan karna hal-hal yang tidak terelakkan, seperti karena sakit berata, sebab-sebab yang sangat teknis maupun karena bertepatan waktunya dengan adat istiadat. Misalnya dalam kasus Pemilu 1999, dimana bertepatan dengan peringatan keagamaan Suku Baduy Dalam, sehingga mereka tidak ikut Pemilu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Amin Ibrahim, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Mandar Jaya, 2009, hal. 76-77

Dinegara-negara maju kecendrungan golput cukup tinggi dari waktu ke waktu. Bukannya mereka tak acuh, tetapi memang menganggap dengan tidak menggunakan hak pilihnya itu justru pilihan terbaik buat yang bersangkutan.<sup>2</sup> Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisisme di kalangan pemilih, di saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Huntington dan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah.<sup>3</sup> Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar.

Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golongan putih merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.<sup>4</sup> Menurut Arbi Sanit, fenomena golput ini memiliki keterkaitan terhadap legitimasi penguasa dan legitimasi sistem politik.<sup>5</sup> Pada masa reformasi sekarang ini pemaknaan istilah golput telah mengalami pergeseran.

Seiring dengan perubahan paradigma tersebut istilah golput pada saat ini merupakan penyebutan untuk orang-orang yang tidak ikut dalam pemilu atau pemilukada. Pemilu Kepala Daerah dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan berarti. Atau tidak ada calon kepala daerah yang disukai dan sebagainya.<sup>6</sup> Maka dari penjelasan di atas, masyarakat golongan putih (golput) terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat golongan putih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada Bungo tahun 2011. Berbagai macam implikasi yang ditimbulkan dari fenomena golput menjadi sangat menarik untuk dicermati dan diteliti. Permasalahan yang

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 368

<sup>4</sup> <http://Leo4Kusumalogspot.com/tentang-golput>, diakses pada tanggal 15 November 2013, pukul 15.00 wib

<sup>5</sup> Fadillah Putra, *Partai politik dan kebijakan publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 104

<sup>6</sup> Eriyanto, *Golput Dalam Pilkada*, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007, dikutip dari [www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id) . diakses pada tanggal 16 November 2013, pukul 18.00 wib

berkembang adalah tentang seputar fenomena golput tersebut dan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam perhelatan ini. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara faktual tentang fenomena ini sekaligus menjelaskan alasan-alasan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam Pilkada Bungo 2011. Mana penjelasan yang lebih cocok untuk fenomena ini, hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk fenomena golput sehingga dapat mengetahui apa yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Faktor-faktor apa sajakah yang menimbulkan perilaku ini yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Pemilukada Bungo pada tahun 2011 berlangsung serentak di seluruh Kabupaten Bungo, termasuk di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bungo yang juga melaksanakan Pemilukada secara bersamaan dengan kecamatan lainnya. Dalam hasil pemilihan, ternyata masih didapati jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah yaitu sebesar 4.817 pemilih atau sebanyak 10.5 % dari total jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 45.978 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan lainnya. Padahal jumlah suara yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kecamatan Pasar Muara Bungo cukup besar, yaitu 15.988 pemilih atau sebanyak 7.5 % dari total 213.264 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Bungo dan sangat berpengaruh pada hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bungo.<sup>7</sup>

Tabel 1.

Jumlah Data Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilukada Bungo tahun 2011.

No.	Kecamatan	DPT Yang Tidak Memilih				Jml. TPS
		L	P	L+P	%	
1	Pelepat Ilir	3.488	2.712	6.200	13.5%	84
2	Pasar Muara Bungo	2.686	2.131	4.817	10.5%	44
3	Rimbo Tengah	2.496	2.088	4.584	10%	38
4	Bungo Dani	2.140	1.787	3.927	8.5%	42
5	Pelepat	1.801	1.345	3.146	6.8%	53
6	Bathin III	1.545	1.193	2.738	6%	33
7	Bathin II Pelayang	1.417	1.046	2.463	5.4%	20
8	Limbur Lubuk Mengkuang	1.349	1.112	2.461	5.4%	30
9	Tanah Sepenggal Lintas	1.253	998	2.251	4.9%	42
10	Tanah Tumbuh	1.167	1.001	2.168	4.7%	24
11	Tanah Sepenggal	1.204	915	2.119	4.6%	37
12	Bathin II Babeko	1.076	935	2.011	4.4%	25
13	Jujuhan	1.182	772	1.954	4.2%	34
14	Jujuhan Ilir	884	684	1.568	3.4%	22
15	Muko-Muko Bathin VII	838	615	1.453	3.2%	28
16	Bathin III Ulu	575	478	1.053	2.3%	22
17	Rantau Pandan	619	446	1.065	2.3%	18
Jumlah		25.720	20.258	45.978	100%	596

Sumber : KPUD Bungo tahun 2013

Dari tabel 2 dan 3, dapat di ketahui bahwa Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan angka golput yang tinggi, dimana berdasarkan data yang di kumpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Pada Pemilukada Bungo tahun 2011 terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Di Kecamatan Pasar Muara Bungo terdapat 4.817 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, jumlah ini terdiri dari 2.686 pemilih laki-laki dan

<sup>7</sup> KPUD Kabupaten Bungo

2.131 pemilih perempuan. Bila dilihat dari jumlah pemilih tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pasar Muara Bungo termasuk dalam Kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya rendah dan memiliki tingkat golput yang tinggi pula. Dengan alasan inilah yang menjadi salah satu alasan penulis memilih Kecamatan Pasar Muara Bungo sebagai lokasi penelitian.

## METODE

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian ini dipilih peneliti sebagai tempat penelitian karena pada lokasi ini termasuk kedalam 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki tingkat golput (golongan putih) yang tinggi di banding Kecamatan lainnya dalam Kabupaten Bungo, yaitu 30%. Dan penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Februari sampai Maret 2014.

Metode penelitian deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan.<sup>8</sup>

Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh karena itu jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pasar Muara Bungo yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu pada Bungo tahun 2011. Adapun jumlah populasi dalam penelitian adalah 4.817 jiwa. Sampel penelitian ini menggunakan rumus Taro Yamane,<sup>9</sup> yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus *Taro Yamane* di atas, maka didapat hasil 98 orang, maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 98 responden.

Teknik penarikan sampel yang digunakan peneliti pada penelitian ini menggunakan Teknik *multistage random sampling*. Kuesioner merupakan alat utama dalam pengambilan data penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup> Masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo termasuk kedalam kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.<sup>11</sup>

Tabel 2

Jawaban Responden Apakah Pada Saat Pemilihan Ikut Memilih Atau Tidak Pada Pemilu pada Bungo Tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ikut Memilih	42	42.9%

<sup>8</sup> Hadari Nawawi. 1987. *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 63

<sup>9</sup> <http://virtualyuni.wordpress.com/2011/03/08/chapter-4-metode-penelitian/>

<sup>10</sup> Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012. Hal.193-194

<sup>11</sup> Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22

2	Tidak Ikut Memilih	56	57.1%
Jumlah		98	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat responden tidak ikut memilih dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2011 yang lalu yaitu sebanyak 57.1%, dan 42.9% responden yang ikut memilih dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2011 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo masih kurang berpartisipasi dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Bungo tahun 2011 yang lalu. Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput.

Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Berdasarkan penjelasan ini, maka kelompok masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo, selain masuk kedalam kelompok golput awam, mereka juga termasuk kedalam kategori kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.<sup>12</sup>

### Faktor Sosial ekonomi

Tabel 3  
 Jawaban Responden Mengapa Tidak Menggunakan Hak Pilih  
 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak Punya Kartu Pemilih	17	30.4%
2	Tidak tahu kalau namanya terdaftar sebagai pemilih	3	5.4%
3	Sebagai protes karena pelaksanaan Pemilukada Bungo tahun 2011 tidak adil	4	7.1%
4	Bingung memilih calon kepala daerah	5	8.9%
5	Tidak ada calon kepala daerah favorit	6	10.7%
6	Tidak percaya Pemilukada bisa memperbaiki keadaan	5	8.9%
7	Harus bekerja	7	12.5%
8	Hari ini ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan	6	10.7%
9	Tidak tahu	3	5.4%
Jumlah		56	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2014

Karena jumlah responden yang tidak ikut memilih dalam Pemilukada Bungo tahun 2011 sebanyak 56 orang responden, maka dari tabel diatas hanya responden yang tidak ikut memilih yang akan menjawab pertanyaannya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 17 orang responden (30.4%) tidak ikut memilih karena alasan masyarakat tidak punya kartu pemilih. Sedangkan sebanyak 7 orang

<sup>12</sup> ibid

responden (12.5%) tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, dan hanya 3 orang responden (5.4%) tidak ikut memilih karena mereka tidak tahu kalau namanya terdaftar sebagai pemilih.

Lalu sebanyak 5 orang memilih tidak percaya Pemilukada bisa memperbaiki keadaan dan menjawab tidak tahu (8.9%). Dan lainnya memilih tidak ikut memilih karena hari sewaktu pemilihan karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sebanyak 6 orang (10.7%), bingung memilih calon kepala daerah sebanyak 5 orang (8.9%) dan tidak ada calon kepala daerah favorit sebanyak 6 orang (10.7%). Masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo sudah lelah dengan janji-janji kampanye yang diberikan oleh calon kepala daerah dan partai politik yang mengusungnya, tetapi janji-janji yang diberikan mereka tidak pernah ditepati. Para calon kepala daerah maupun partai politik yang mengusungnya cenderung mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya daripada kepentingan masyarakat.

Hal inilah yang membuat masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo tidak percaya dengan partai politik, sehingga masyarakat lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada menghadiri acara Pemilukada. Jadi, dengan alasan-alasan tersebut masyarakat tidak menggunakan hak pilih mereka (golput) dalam Pemilukada Bungo tahun 2011 yang lalu sehingga menyebabkan tingkat partisipasi mereka menjadi rendah. Tinggi rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat kehidupan ekonomi, dan
3. Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik. Salah satu fasilitas yang dapat memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik adalah adanya suatu sistem komunikasi yang lancar dalam masyarakat dan sistem politik.

Senada dengan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki bentuk partisipasi pasif, dimana bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Misalnya, kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.<sup>14</sup>

### Faktor Rasional

Faktor rasional adalah faktor yang dilihat dari pendekatan rasional yang muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dengan status sosial yang sama, yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan diatas.<sup>15</sup> Data ini diambil untuk mengetahui bagaimana faktor rasional yang dimiliki setiap masyarakat mempengaruhi mereka sehingga tidak ikut memilih.

Tabel 4

Jawaban Responden Apakah Visi dan Misi yang diberikan oleh Masing-masing Calon Kepala Daerah Mempengaruhi untuk Tidak Memilih Pada Pemilukada Bungo Tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat mempengaruhi	40	40.8%
2	Mempengaruhi	26	26.5%
3	Tidak mempengaruhi	32	32.7%
Jumlah		98	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2014

<sup>13</sup> Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012. Hal.193-194

<sup>14</sup> Sastroadmojo Sudijono, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, 1995, hal. 74

<sup>15</sup> Efriza, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta, 2012. Hal.514

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa 40 orang responden dari 98 orang responden (40.8%) mengatakan bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon kepala daerah sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk tidak ikut memilih pada saat pemilihan berlangsung. Sedangkan 26 orang responden (26.5%) justru mengatakan bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon kepala daerah mempengaruhi dalam tidak ikut dalam pemilihan, dan hanya 32 (32.7%) orang responden dari 98 orang responden yang menyatakan bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon kepala daerah tidak mempengaruhi dalam hal tidak ikut memilih.

Faktor rasional ini melihat visi dan misi yang diberikan calon kepala daerah harus jelas dan program yang dikemukakan harus menarik simpati para pemilih agar pemilih mau memilih mereka. Namun apabila para calon kepala daerah tersebut gagal dalam mempromosikan visi dan misi maupun program-programnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih (golput) bisa menjadi rasional bagi pemilih. Pada masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo, mereka masih menggunakan pilihan rasional dalam memilih calon Kepala Daerah dalam Pemilu pada tahun 2011 yang lalu.

Masyarakat melihat visi dan misi yang diberikan kepada mereka sangat mempengaruhi mereka untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Apabila visi dan misi yang diberikan calon kepala daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan ikut memilih dalam pemilihan. Sebaliknya apabila masyarakat merasa bahwa visi dan misi yang diberikan calon Kepala Daerah tersebut gagal atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat tidak ikut memilih dalam pemilihan. Visi dan misi yang disampaikan para calon kepala daerah haruslah jelas dan memiliki tujuan yang tepat dan bukan hanya sekedar janji politik saja. Sehingga masyarakat tidak jenuh dan bosan terhadap Pemilu. Ini merupakan komunikasi politik yang harus dijalin para calon kepala daerah supaya tercipta suasana yang kondusif dalam proses Pemilu. Hal ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Richard M. Perloff. Menurut Richard M. Perloff komunikasi politik merupakan proses dimana kepemimpinan nasional, media dan masyarakat saling bertukar dan memberi makna terhadap pesan-pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Definisi Perloff di atas mengandung beberapa unsur;<sup>16</sup>

1. Pertama, Komunikasi politik merupakan sebuah proses. Komunikasi politik tidak dapat terjadi secara otomatis begitu saja, di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang kompleks dan dinamis.
2. Kedua, pesan dalam komunikasi politik terkonsentrasi pada lingkungan pemerintahan atau yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik, dengan demikian, tidak hanya concern dengan persoalan pemilu, namun pada segenap hal yang berkaitan dengan politik. Dengan kata lain, komunikasi politik terjadi ketika masyarakat, media dan pemerintah saling "berdialog" mengenai isu-isu seputar elit dan publik.

### Faktor Psikologis

Psikologis masyarakat yang selalu di beri harapan dengan janji-janji manis oleh para kandidat Kepala Daerah namun tidak ada realisasinya menjadikan mereka apatis (cuek) secara psikologinya. Hal ini bias dilihat dari table 5 berikut:

Tabel 5  
Jawaban Responden Apakah Mempercayai dan Merasa Perlu Untuk Mengikuti Pemilu  
Kabupaten Bungo tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Sangat Perlu	36	36.7%
2	Tidak Perlu	19	19.4%
3	Tidak Peduli	43	43.9%
Jumlah		98	100%

Sumber: Kuesioner Penelitian Tahun 2014

<sup>16</sup> Ibid

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 43 dari 98 orang responden (43.9%) mengatakan bahwa tidak mempercayai dan tidak perduli untuk mengikuti Pemilukada. Sedangkan 36 orang responden (36.7%) justru mengatakan bahwa mereka mempercayai dan merasa sangat perlu untuk mengikuti Pemilukada, dan hanya 19 orang responden (19.4%) dari 98 orang responden yang menyatakan tidak mempercayai dan merasa tidak perlu untuk mengikuti pemilu. Faktor rasional tersebut juga mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo untuk tidak ikut memilih dalam pemilihan. Karena masyarakat merasa masih tidak puas dengan hasil Pemilu dan belum memperjuangkan kepentingan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat merasa memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, sebab keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Jadi, masyarakat merasa tidak perlu bahkan ada yang tidak perduli untuk mengikuti Pemilu.

Tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo terhadap pelaksanaan Pemilukada Bungo tahun 2011 yang lalu cukup minim, karena masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji calon kepala daerah yang hanya memberikan janji-janji palsu selama masa kampanye untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan. Padahal setelah pemilihan berlangsung dan kekuasaan sudah dimiliki, kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata memuaskan. Perilaku masyarakat ini tidak terlepas dari pola pikir generalisasi masalah, ketika masyarakat melihat perilaku sebagian besar elit politik dan elit partai mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya maka masyarakat menganggapnya sebagai perilaku keseluruhan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilukada Bungo tahun 2011, di Kecamatan Pasar Muara Bungo yaitu meliputi :

1. Faktor sosial ekonomi.

Faktor latar belakang status sosial-ekonomi merupakan indikator untuk mengukur karakteristik pemilih *non-voting* (golput) dan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo pada Pemilukada Bungo tahun 2011. Terutama dalam hal pekerjaan, dimana sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswastawan sebanyak 60 responden atau sebanyak 61.2% dan dalam pekerjaan sehari-harinya lebih memilih untuk fokus bekerja daripada mengikuti Pemilukada. Tingkat Partisipasi

Rendah tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo pada Pemilukada Bungo tahun 2011 termasuk kedalam jenis partisipasi pasif, dimana dalam hal ini dari 98 responden yang terdaftar pada Pemilukada Bungo tahun 2014, hanya 42 responden (42.9%) yang turut ikut dalam pemilihan dan selebihnya sebanyak 56 responden (57.1%) tidak ikut memilih dikarenakan oleh berbagai faktor. Dan bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi keluaran suatu sistem politik. Rendahnya tingkat partisipasi dan tidak memilihnya masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo pada Pemilukada Bungo tahun 2011 termasuk kedalam kelompok golput awam dan golput pilihan.

2. Faktor psikologis dan faktor rasional

Dalam hal ini adalah komunikasi politik yang kurang dilakukan calon kepala daerah terhadap masyarakat di Kecamatan Pasar Muara Bungo, dimana komunikasi yang dilakukan hanya ketika Pemilukada berlangsung. Partai politik dan kontestan Pemilukada Bungo tahun 2011 tidak melakukan komunikasi politik yang maksimal kepada masyarakat Kecamatan Pasar Muara Bungo. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang menilai bahwa hanya 23 responden atau sebanyak 23.5% partai politik melakukan komunikasi politik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lalu selebihnya responden menjawab Tidak sebanyak 54 responden (55.1%) dan tidak tahu sebanyak 21 responden (21.4%).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 – 2004*. Jakarta. Pustaka Eureka.
- Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Daerah, Komisi Pemilihan Umum Bungo, Tahun 2013
- Efriza. 2012. *Political Explor*. Bandung: Alfabeta.
- Eriyanto, Golput Dalam Pilkada, *Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007*, dikutip dari [www.lsi.co.id](http://www.lsi.co.id). diakses pada tanggal 16 November 2013, pukul 18.00 wib
- Gun, Gun Heryanto dan Shulhan Rumar. 2013. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta : Rineka Cipta.
- <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 16 November 2013, Pukul 17.00 wib
- <http://Leo4Kusumalogspot.com/tentang-golput>, diakses pada tanggal 15 November 2013, pukul 15.00 wib
- <http://virtuallyuni.wordpress.com/2011/03/08/chapter-4-metode-penelitian/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2014
- <http://belajarsikologi.com/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2014
- <http://uungmashuri.blogspot.com/2011/01/pendidikan-politik.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2014 pukul 14.00
- <http://masroed.wordpress.com/2010/05/27/pentingnya-sosialisasi-politik-dalam-kehidupanpolitik-masyarakat-di-indonesia/>. Di Akses pada tanggal 15 Maret 2014. Pukul 22.00 WIB
- <http://www.scribd.com/doc/35718145/Pengertian-Sosialisasi-Politik-Menurut-Para-Ahli> Luar. Diakses Tanggal 15 Maret 2014. Pukul 21.20 WIB
- <http://mrobby.wordpress.com/2010/12/31/pengertian-komunikasi-politik/> diakses pada tanggal 15 Maret 2014 pukul 13.00 wib
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Mandar Jaya.
- Kencana, Inu Syafiie dan Azhari, 2012. *Sistem Politik Indonesia*, bandung : Refika Aditama.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Norris, Pippa, "Political Communication," <http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Political%20Communications%20encyclopedia2.pdf>, Tanggal 15 Maret 2014.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai politik dan kebijakan publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Plano, Jack C. Robert E. Ringgs dan Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: C.V. Rajawali Press.
- Rahmat, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia*, Surabaya : Penerbit SIC.
- Rohman, Arif. 2002. *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo
- Sudijono, Sastroadmojo. 1995. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press.
- Sherman, Arnold K. dan Aliza Kolker. 1987. *The Social Bases of Politics*, California : A Division of Wodsworth Inc.
- Undang-undang Otonomi Daerah. 2000. Jakarta : Restu Agung.
- Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2007. Jakarta : Sinar Grafika.